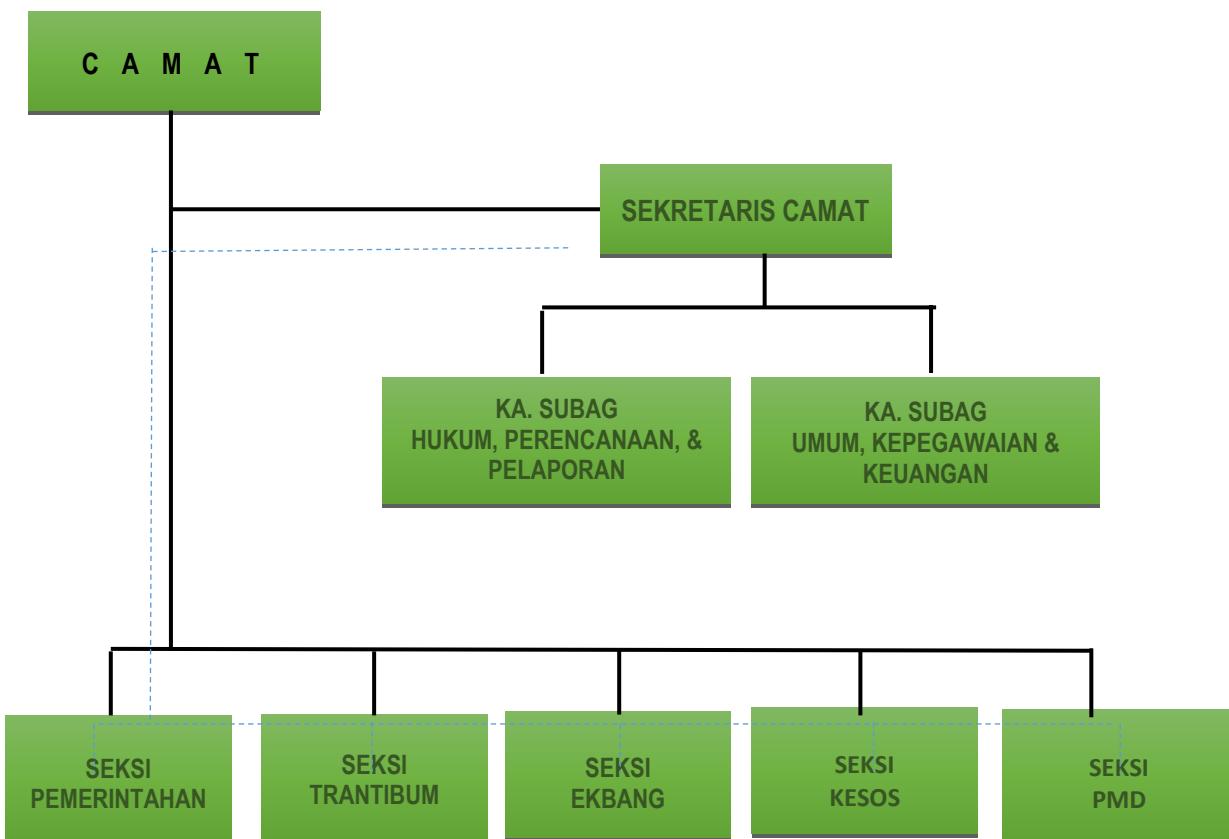


Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Pasilambena

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN

Perbup. No. 29 Tahun 2009



Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

No	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		PROSENTASE	
		PNS	CPNS	PNS	CPNS
1	S2	1	0	11.11 %	0
2	S1	8	0	33.33 %	0
3	D3	1	0	22.22 %	0
4	SLTA	3	0	33.33 %	0
5	STP	0	0	0	0
6	SD	0	0	0	0
		13	0	100 %	0

No	Gol. Ruang	Tingkat Pendidikan Formal (orang)								JML
		S2	S1	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	
1	IV/c	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	IV/a	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	III/d	-	3	-	-	-	-	-	-	2
5	III/c	-	3	-	-	-	-	-	-	3
6	III/b	--	2	1	-	-	-	-	-	2
7	III/a	-	2	-	-	-	-	-	-	2

8	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-
9	II/c	-	-	-	-	-	1	-	-
10	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-
11	II/a	-	-	-	-	-	2	-	-
Jumlah									14

e. Penjabaran Pelaksanaan Program yang dilaksanakan Kecamatan Pasilambena Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Pasilambena Tahun 2022 mengelolah 6 program yang didalamnya terdapat 12 kegiatan.

Penjabaran program / kegiatan tersebut, sebagai berikut :

1. Program Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Maksud dari Kegiatan perencanaan, penganggaran kinerja perangkat Daerah adalah untuk meujudkan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dan dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif :

1	Program Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15,823,000	15,823,000	100
1	Koordinasi Penyusunan DPA- SKPD	4,335,000	4,335,000	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6,668,000	6,668,000	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Capaian Kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	4,820,000	4,820,000	100
4				

Capaian kinerja 100% Adapun sasaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan termonitoringnya pelaksanaan kegiatan sehingga tercapai indikator kinerja dapat dipastikan tercapainya. Adapun kelompok sasaran seluruh ASN Kecamatan Pasilambena pada khususnya.

2. Program Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Program Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah adalah salah satu program untuk menunjang tertib

administrasi dalam penggunaan Barang Milik Daerah untuk penunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

2 PAdministrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	6,320,000	6,195,000	99,80
5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6,320,000	6,195,000	99,80

Optimalisasi penggunaan anggaran pada program ini dimaksudkan untuk membantu Tertib administrasi tentang pengelolaan dan penggunaan inventaris Barang milik daerah

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Program Kegiatan Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah agar terujud kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,765,000	4,765,000	100
6 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	4,765,000	4,765,000	100

Terujud kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan

4. Administrasi Umum perangkat Daerah

5. Program Administrasi Umum perangkat Daerah

merupakan program rutin untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat, beberapa kegiatan yang masuk dalam program pelayanan administrasi perkantoran ini adalah

4 Program Administrasi Umum Perangkat Daerah	215,803,333	215,371,700	99,80
7 Penyedia Komponen Instalasi Listrik Penerangan Banguna Kantor	1,662,500	1,662,500	100
8 Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan	6,000,000	5,791,200	96,52
9 Penyedia bahan Logistik Kantor	21,003,833	21,003,8330	100
10 Penyedia bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2,460,000	2,460,000	100
11 Fasilitas Kunjungan Tamu	21,240,000	21,40,000	100
12 Penyelenggara Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2,880,000	1,800,000	62.50

Kegiatan ini tidak mendapat kendala karena hanya berupa kegiatan belanja modal pakaian khusus saja.

5.. Program Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat menunjang aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Adapun Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang akan dilaksanakan dalam beberapa sub. Kegiatan

5 Program Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		83,511,600	77,796.464	93,16
13	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21,486,000	15,919,664	74,09
14	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15,000,000	15,000,000	100
15	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	47,025,600	46,876,800	99,68

Dalam pelaksanaan Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diperlukan kerjasama dari berbagai pihak, baik itu Pemerintah Daerah maupun pihak penyedia. Tanpa koordinasi tentu tujuan yang menjadi sasaran kegiatan tidak tercapai dengan maksimal dan seefisien mungkin. Adapun hasil (Outcome) atau dampak yang diharapkan tersedianya kebutuhan penunjang untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan operasional pada Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar.

6. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah.

6 Program Pemeliharaan Barang Milik daerah		44,420,000	40,938,000	92,16
16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	44,420,000	40,938,000	92,16

Kegaitan ini merupakan kegiatan Yang Bersifat Pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor.

7. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

7 Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		4,640,000	560,000	12,07
17	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4,640,000	560,000	12,07

8. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

8	<i>Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	20,000,000	20,000,000	100
18	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	20,000,000	20,000,000	100

9. Program Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sebagai obyek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemerintah desa harus memberi serangkaian informasi yang diperlukan dan melakukan upaya yang direkomendasikan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja.

9	<i>Program Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	7,379,000	7,379,000	100
19	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan partisifatif	3,349,000	3,349,000	100
20	Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan di wilayah Kecamatan	3,940,000	3,940,000	100

10. Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Program Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan.

9	<i>Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	130,567,567	120,539,00	92,32
----------	--	--------------------	-------------------	--------------

19	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Desa	6,567,000	6,567,000	100
20	Singkronisasi Program Keraja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	124,000,000	113,972,000	90,30